



P U T U S A N

Nomor 410/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Siti Habibah Gobel Binti Osi Gobel Al, tempat dan tanggal lahir Sangkub, 24 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Vi, Rt 10, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Penggugat

m e l a w a n

Hamka Paransi Bin Yakin Paransi, tempat dan tanggal lahir Tanoyan, 27 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Vi, Rt 10, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 410/Pdt.G/2018/PA.Ktg Tanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1992 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangtombolang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K/8/PW.01/10/1992 tertanggal 22 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Sangkub selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanoyan Selatan selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di Desa Tanoyan Selatan sampai dengan terjadinya perpisahan.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Wisnu Paransi, laki-laki umur 26 tahun.
 - b. Elma Thiana Paransi, perempuan, umur 21 tahun.
 - c. Abdul Azis Paransi, laki-laki, umur 14 tahun.

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :

Hal. 2 dari 12 Put. No 4101Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah.*
- b. *Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 6 (enam) bulan lamanya.*

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat yang sering mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 3 dari 12 Put. No 4101Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/8/PW.01/10/1992 tertanggal 22 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Sakina Walang Binti Nurdin Walang**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di RT 07 Dusun VIII Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow saksi adalah teman Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Sangkup, kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Tergugat setelah itu pindah di rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Put. No 4101Pdt.G/2018/PA.Ktg



2. **Jubaeda Ganggai Binti Baidun ganggai**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT 13 Dusun VII desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah teman Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Sangkup, kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Tergugat setelah itu pindah di rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan

Hal. 5 dari 12 Put. No 4101Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/8/PW.01/10/1992 tertanggal 22 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1992 maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dan sejak bulan Nopember 2017, Penggugat pergi dari rumah sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 8 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Hal. 6 dari 12 Put. No 4101Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, kedua orang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi hanya mendengar cerita Penggugat, namun saksi –saksi mengetahui Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari rumah saksi-saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, , Tergugat sering mengusir Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sering mengusir Penggugat dari rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarannya, namun tidak terbuktinya pertengkarannya Penggugat dan tergugat tidak serta merta membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, karena ternyata berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak dalam

Hal. 7 dari 12 Put. No 4101Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpastian, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَالِمٌ إِلَّا عَلَّمْنَا مَا لَا يَنْفَعُهُ إِلَّا إِتْيَانَهُ يَوْمَ الْمَعَادِ
وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَالِمٌ إِلَّا عَلَّمْنَا مَا لَا يَنْفَعُهُ إِلَّا إِتْيَانَهُ يَوْمَ الْمَعَادِ
وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَالِمٌ إِلَّا عَلَّمْنَا مَا لَا يَنْفَعُهُ إِلَّا إِتْيَانَهُ يَوْمَ الْمَعَادِ
وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَالِمٌ إِلَّا عَلَّمْنَا مَا لَا يَنْفَعُهُ إِلَّا إِتْيَانَهُ يَوْمَ الْمَعَادِ

Artinya:”dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Hal. 8 dari 12 Put. No 4101Pdt.G/2018/PA.Ktg



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut :

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal.290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
إعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya :Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Hamka Paransi Bin Yakin Paransi) terhadap Penggugat (Siti Habibah Gobel Binti Osi Gobel AI);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000 empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Put. No 4101Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Dzulkaidah 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan s b usunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI.

Idil Pontoh, S.H.I

Rincian Biaya:

1.	1.Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	2.ATK/Proses	Rp.	50.000
3.	3.Panggilan	Rp.	380.000
4.	4.Redaksi	Rp.	5.000
5.	5.Materai	Rp.	6.000

Hal. 11 dari 12 Put. No 4101Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 471.000
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No 4101Pdt.G/2018/PA.Ktg